

**PRINSIP HABLUMMINALLAH DAN HABLUMMINANNAS
AKUNTABILITAS KEUANGAN DI PESANTREN ATTANWIR PUTRI
DUSUN KAJUK KELURAHAN RONGTENGAH KECAMATAN
SAMPANG KABUPATEN SAMPANG**

Ahmad Wahyudin

email: aahmadwahyudin85@gmail.com

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

Jl. Sarirogo No. 1 Sarirogo Sidoarjo

Eni Maryanti

email. enimaryanti@umsida.ac.id

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Jl. Mojopahit No.666 B Sidowayah Celep Sidoarjo

Article History:

Dikirim:

10 Juli 2021

Direvisi:

25 Juli 2021

Diterima:

25 Agustus 2021

Korespondensi Penulis

No WA :

Abstrak : Akuntabilitas merupakan wujud kewajiban-kewajiban yang diamanahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dan menjelaskan realisasiotoritas yang diperoleh sesuai dengan misi organisasi. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan pemaknaan akuntabilitas keuangan di pondok pesantren. Metode fenomenologi transendental Hursel adalah paradigma interpretif yang digunakan untuk mengetahui kesadaran informan dalam pemahaman dan pemaknaan akuntabilitas di Pondok Pesantren Attanwir Putri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara. Metode fenomenologi transendental Husserl adalah paradigm interpretif yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran informan dalam memahami dan memaknai akuntabilitas keuangan di pondok pesantren Attanwir Putri. Data diperoleh dengan wawancara secara mendalam. Alat analisis yang digunakan dengan *epoche*, reduksi fenomenologi, variasi imajinasi, serta sintesa dan esensi. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pada dasarnya praktik akuntabilitas keuangan pesantren merupakan representasi kepercayaan diri dari nilai-nilai Islam yang berpedoman pada Alquran dan Alhadist, makna akuntabilitas keuangan di pesantren adalah akuntabilitas kejujuran, dan moral yaitu perilaku prinsip transparansi *hablumminallah* dan *hablumminannas* untuk mendapatkan kepercayaan sebagai teladan dan untuk menunjukkan perilaku yang taat kepada sang pemeberi amanah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Keuangan Pesantren, Fenomenologi

PENDAHULUAN

Accountability merupakan wujud kewajiban-kewajiban yang diamanahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dan menjelaskan realisasi otoritas yang diperoleh sesuai dengan misi organisasi.¹ Konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh Lobo (2007) adalah kewajiban *agent* untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya kepada pihak pemberi amanah (*principal*). Sedangkan Sedarmayanti (2004)² mengatakan bahwa akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Permasalahan akuntabilitas dalam organisasi keagamaan adalah pengungkapan laporan pertanggungjawaban. Urgensi akuntabilitas dan transparansi harus didorong untuk menciptakan kepercayaan dan keteladanan kepada masyarakat dalam organisasi keagamaan semakin lebih baik dan terbuka. Randa (2011)³ meneliti tentang akuntabilitas organisasi religius, mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan hak masyarakat atau kelompok dalam masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat. Tentu saja pondok pesantren bagian dari lembaga religius yang memiliki laporan pertanggungjawaban, namun dalam praktiknya lembaga keagamaan masih kurang diperhatikan dalam mengungkap laporan pertanggungjawaban dalam hal transparansi ke publik. Akuntansi merupakan bagian integral dari pemahaman teologi Islam yang dapat memperbaiki kualitas ibadah sebagai muslim. Akuntabilitas telah menjadi pusat perhatian para peneliti untuk melakukan studi akuntansi di lembaga keagamaan yang mencoba untuk mengembangkan dan mengaplikasikan akuntansi dalam organisasi keagamaan yang sederhana yang tidak ditemukan dalam sistem akuntansi dan pertanggungjawaban organisasi privat.

Akuntabilitas yang bersifat vertikal merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan *hablumminallah*. Sedangkan akuntabilitas yang bersifat horizontal menggambarkan hubungan yang bersifat *hablumminannas*. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas yang bersifat horizontal adalah prinsip profesionalisme dan transparansi. Amanah pada prinsipnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai Sang Pemberi Amanah untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian non-positivistik. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta sosial terkait akuntabilitas yang dipraktekkan diorganisasi keagamaan. Karena penelitian ini sarat dengan nilai-nilai subjektivitas dan budaya lokal, maka paradigma

¹ Ardhiyanti, Anita. 2013. *Akuntabilitas dan Transparansi Pada Panti Asuhan*. Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya

² Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) , Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance*. Mandar Maju. Bandung.

³ Randa, Fransiskus. 2011. *Rekonstruksi Konsep Akuntabilitas Organisasi Gereja: (Study Etnografi Kritis Inkulturatif Pada Gereja Katolik di Tanah Toraja)*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tentunya sangat berbeda dengan pendekatan penelitian pada penelitian positivistik. Berbeda dengan kaum subyektifis, alih-alih menganggap dunia memiliki keteraturan, pendekatan subyektif justru mengasumsikan bahwa pengetahuan tidak mempunyai sifat yang obyektif, melainkan bersifat interpretif. Maka meskipun mereka juga mencari kebenaran, mereka lebih meragukan bahwa terdapat realitas obyektif (Mulyana, 2007).⁴

Burrell dan Morgan (1979) mengatakan bahwa fenomenologi mempertimbangkan pemahaman makna kehidupan keseharian manusia untuk mengungkap masalah sosial dan menginterpretasikan bagaimana orang bertindak dalam kehidupan keseharian. Jadi dapat disimpulkan konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia apa adanya di lingkungan pondok pesantren. Untuk mengidentifikasi kualitas yang esensial dari pengalaman kesadaran dilakukan dengan mendalam dan teliti (Smith, etc., 2009)⁵, dalam hal ini perlu proses untuk mencapai esensi dan substansi yang mendalam diperlukan intuisi dan refleksi dalam mengambil tindakan dan keputusan untuk mencapai misi organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002).⁶

Wasistiono (2003)⁷ menjelaskan tentang *akuntabilitas moral* yaitu berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat. Akuntabilitas merupakan konsep mengenai perilaku untuk mengawasi pihak lain, untuk menilai apakah mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka, dan untuk menerapkan sanksi jika mereka ini belum memenuhi tanggung jawab (Mashaw, 2006).⁸ *Kewajiban moral* adalah dalam rangka memberikan laporan kepada orang lain dengan jujur sesuai amanat yang diterima, untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana berbagai sumber daya luhur telah diterapkan dengan mengetahui dampaknya jika berdosa.

⁴ Mulyana, Deddy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

⁵ Smith, Jonathan A., Flowers, Paul., and Larkin. Michael. 2009. *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage. diakses 7 maret 2020.

(<https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/interpretative-phenomenological-analysis/book227528#preview>)

⁶ Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.

⁷ Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Fokus Media. Bandung.

⁸ Mashaw, Jerry L. 2006. *Accountability and Institutional Design: Some Thoughts on the Grammar of Governance*, In *Public Accountability: Designs, Dilemmas And Experiences* 115 (M. W. Dowdlead), Cambridge University Press.

Akuntabilitas spiritual (Endahwati, 2014)⁹ merupakan akuntabilitas yang menggambarkan aspek keagamaan yang dirasakan seseorang untuk mewujudkan nilai pertanggungjawaban. Akuntabilitas spritual terwujud dalam wisata hati, ketaqwaan, dan tazkiyah. Pengukuran keberhasilan akuntabilitas spiritual dapat dilihat dengan peningkatan ketaqwaan seseorang. Ciri-ciri orang yang bertaqwa yaitu suka menafkahkan harta, mampu menahan amarah, mampu memaafkan orang lain. Segala perilakunya bertujuan akhir mencapai ridho Ilahi Sang Maha Pencipta. Seluruh wujud ciptaan Sang Maha Kuasa akhirnya akan menemui wujud sucinya bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat (Susilo, 2014)¹⁰. Akuntansi menurut perspektif Islam adalah semua tentang norma-norma positif dan membawa nilai-nilai ke Tuhanan (*self-transendent*) dalam kehidupan sehari-hari (Prasetio, 2017)¹¹, mencari kehendak Allah SWT dan mengikuti perintahnya dalam bentuk Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan akuntansi dan manajemen Islam bukan hanya duniawi dan yang berorientasi uang, tapi berusaha untuk mencari hadiah intrinsik jangka panjang, keberkahan Allah (Ahmed, 2012)¹². Islam memegang semua pemimpin dan pengikut bertanggung jawab untuk membangun masyarakat dan untuk menyebarkan aturan Allah di muka bumi (Prasetio, 2017). Kedua belah pihak sama di mata Allah dan karenanya harus melakukan peran terbesar mereka dengan integritas dan dedikasi.

Telaah Makna Akuntabilitas keuangan Dipondok Pesantren

Akuntabilitas keuangan merupakan representasi kepercayaan dan amanah dari nilai-nilai agama Islam. Oleh sebab itu, akuntabilitas keuangan menjadi humanis yang diterapkan pada organisasi pondok pesantren dan mampu memberikan legitimasi moral dan etika dalam praktik akuntabilitas keunagan. Nilai-nilai agama Islam yang dipraktikkan akuntabilitas keunagan dipondok pesantren, mampu memberikan pendekatan spiritualitas dan kekuatan moral bagi manajemen pondok pesantren dalam mempertanggungjawaban laporan keuangan yang dipercaya oleh yayasan, santri, wali santri dan masyarakat. Ada beberapa makna akuntabilitas dari hasil wawancara mendalam yang diperoleh peneliti dilapangan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kejujuran

Manajemen pondok pesantren sebagai pengelola dana dari berbagai sumber mulai dari pendafran santri baru, register ulang masuk pondok, iuran dan santri dapat dikelola dengan baik. Al-Quran dan Al-Hadist memberi gambaran yang komprehensif tentang prinsip pertanggungjawaban yang benar (jujur) guna memberi teladan dan dorongan pada yayasan, santri, wali santri dan masyarakat dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan. Hasil wawancara dengan Irma sebagai bendahara pesantren mengatakan bahwa:

⁹ Endahwati, Yosi Dian. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah

¹⁰ Susilo, Joko. 2014. *Spiritualitas Santri Lelana pada Serat Mursada*. Tesis. Kajian Sastra dan Budaya Universitas Airlangga Surabaya.

¹¹ Prasetio, Januar Eko. 2017. Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2017, Hlm. 19-33.

¹² Ahmed, Alim Al Ayub. 2012. Accounting in Islamic Perspective: A Timely Opportunity A Timely Challenge. *ASA University Review*, Vol. 6 No. 2, July–December, 11-31.

Selama saya menjadi bendahara proses pencatatan uang dilakukan sesuai dengan prosedur disepakati bersama. Prosedur tersebut adalah setiap transaksi masuk uang dan keluar uang itu harus ada penanggungjawab kalau tidak ada penanggungjawabnya/pelaksana, saya tidak dapat mencairkan atau menerima uang tersebut, bila terjadi hal tersebut saya (konfirmasi ulang) pada orang tersebut untuk mencari tahu dari mana, dari siapa, dan untuk apa uang itu sehingga jelas uang itu digunakan untuk apa dan dari siapa untuk (dipertanggungjawabkan) dikemudian hari.

Sumber uang yang masuk dan keluar dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dalam penggunaannya. Ini menunjukkan bahwa bendahara dalam pencatatan transaksi keluar masuknya uang dapat dipertanggungjawabkan secara periodeik. Dalam organisasi keagamaan pertanggungjawaban menjadi keharusan dengan menciptakan pengawasan, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Sedarmayanti, 2004).

Prinsip kejujuran menjadi pedoman berpikir dalam melakukan segala transaksi keuangan dan pertanggungjawabannya. Dengan demikian, prinsip kejujuran sebagai pedoman hidup untuk melakukan aktifitas apapun dapat menghindari kecurangan dan rekayasa dalam pembuatan laporan keuangan dipondok pesantren. Sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW yang membawa pesan tentang kejujuran adalah: Selalulah kamu jujur, karena sesungguhnya jujur itu mengantarkan kamu pada kebaikan dan kebaikan itu sesungguhnya mengantarkan pada surga. Sedangkan dusta akan mengantarkan pada keburukan dan dosa, dan sesungguhnya dosa itu akan mengantarkan pada neraka. (Hadits: Mutafaqun Alaih).

Pemahaman bendahara pondok pesantren dalam penerapan akuntabilitas keuangan dipondok pesantren bahwa setiap transaksi keuangan harus dapat dipercaya untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat, meringkas, dan menyajikan laporan sesuai dengan realitas jumlah uang yang digunakan. Selain itu, bendahara pondok pesantren memiliki keyakinan keuangan dipondok pesantren merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik (jujur) sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan (Triyuwono 2012, p.209)¹³. Maksudnya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia memiliki kewajiban memanfaatkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah.

Pondok pesantren memiliki beberapa divisi untuk melaporkan bendahara tentang kegiatan untuk diproses agar dapat menghasilkan informasi yang benar (jujur). Sebagaimana hasil wawancara Irma bendahara pesantren sebagai berikut:

Karena setiap divisi memiliki program kegiatan masing-masing sehingga memerlukan anggaran untuk kegiatannya, setelah itu saya akan menginput dalam laporan keuangan yang saya buat dari setiap divisi-divisi yang ada untuk dibuat laporan keuangan dengan tidak mengurangi atau merubah (jujur) apa yang sudah dianggarkan setiap divisi tersebut.

Wawancara tersebut diperkuat dengan Bendahara 2 pondok pesantren Attanwir Putri yaitu Nadiya Faradisa:

¹³ Triyuwono, Iwan. 2012. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, Jakarta: PT Grajafindo Persada.

“Saya dalam membuat anggaran untuk tugas dan wewenang yang ada di divisi-divisi seperti anggaran membuat surat ijin, anggaran ronda malam dan lain-lainnya. Itu semuanya harus (dilaporkan) kepada bendahara apa yang menjadi keperluan divisi. Selain itu, uang dari hasil penjualan surat ijin santri harus dilaporkan setiap bulannya kepada bendahara pesantren”.

Nilai kejujuran dan tanggungjawab dihasilkan dari transparansi yang dilakukan penerima amanah. Akuntabilitas (Endahwati, 2011) merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas yang bersifat horizontal adalah prinsip profesionalisme dan transparansi (Endahwati, 2011). Selain itu, salah satu perintah Allah SWT tentang jujur yang harus dijaga dalam setiap muslimin untuk menciptakan kepercayaan dari orang lain. Dengan demikian, sebagai pengawas untuk manajemen pondok pesantren serta dapat memberi suatu batasan untuk berperilaku dan mendorong agar berperilaku baik dalam melaksanakan tugas, kewenangannya dan tidak melakukan penyimpang atau kecurangan (ketidakjujuran) dalam pembuatan pertanggungjawaban.

Pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara pondok pesantren terkait keuangan pondok pesantren dan laporan kegiatan pesantren dilaporkan setiap bulann dan tahunan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Irma sebagai bendahara pondok pesantren:

Dalam hal pembuatan (laporan pertanggungjawaban) dilakukan setiap bulan ini untuk mempermudah dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban ketua pondok pesantren. Sedangkan untuk yayasan, laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap satu setahun sekali dalam rapat bersama antara pengurus pondok pesantren dan pengurus yayasan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan KH. Hajjad Siraj sebagai ketua pondok pesantren:

“Dalam pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pondok pesantren, bendahara harus melaporkan keuangan pesantren setiap bulanan yang disampaikan dalam rapat bulan dan menyampaikan perkembangan terkait keuangan pesantren. Dan juga bendahara harus membuat laporan (pertanggungjawaban) terkait keuangan pesantren untuk yayasan setiap tahun yang akan disampaikan pada rapat bersama. Ini semua dilakukan untuk melihat kinerja pengurus pesantren dan prospek kedepan pondok pesantren untuk kemajuan pesantren dan kenyamanan santri yang ada dipondok.”

Akuntabilitas (pertanggungjawaban) laporan dilakukan dengan prinsip kejujuran dengan membuat laporan bulanan yang rutin dan tahunan kepada pihak yang berkepentingan dan disampaikan dalam forum resmi untuk mewujudkan nilai transparan yang bersifat amanah dan professional (Endahwati, 2014). Pembentukan laporan yang bersifat transparan merupakan amanah Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282, sehingga prinsip ini harus benar-benar dilaksanakan oleh pengelola dana pondok pesantren untuk mewujudkan akuntabilitas laporan. Laporan yang bersifat transparan juga akan meningkatkan kepercayaan pihak-pihak dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pondok pesantren secara profesional.

Manajemen pengurus pondok pesantren hanya sebagai orang yang diberi kepercayaan (amanat) untuk mengelola dengan baik dan jujur serta memiliki tugas, fungsi dan kewenangan

yang diberikan harus memahami dengan baik dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan sebagai pengurus pondok pesantren untuk memberi informasi yang valid kepada pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik program pondok pesantren dan kegiatan diluar pondok pesantren (Sulistiyani, 2004)¹⁴. Disisi lain, santri, wali santri, dan masyarakat harus dapat informasi semua kegiatan yang berkaitan dengan pondok pesantren.

Penerapan praktik akuntabilitas keuangan pondok pesantren untuk mengelola pondok pesantren dengan ketulusan, keikhlasan, kejujuran. Sehingga dalam laporan peratanggungjawaban pondok pesantren merupakan suatu kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jujur bagian dari aspek *habluminnannas*. Dengan memiliki ketaqwaan, kejujuran dan komitmen akan menjadi orang yang bijaksana dan peduli untuk kemasyalahatan bersama.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik (Mardiasmo, 2002) yang jujur dan amanah. Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis sedangkan responsibilitas didasarkan atas kebijaksanaan. Akuntabilitas merupakan sifat umum dari hubungan otorisasi asimetrik misalnya yang diawasi dengan yang mengawasi, agen dengan prinsipal atau antara yang mewakili dengan yang diwakili. Dari segi fokus dan cakupannya, responsibility lebih bersifat internal sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal (Mahsum, 2006).

Rasulullah SAW adalah seorang yang mempunyai sifat jujur, terpercaya (Amanah) dan bijaksana. Oleh sebab itu kita patut menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik. Sesuai Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 21:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.

Ayat diatas tersirat suatu pelajaran hidup bahwa orang yang jujur akan menjadi suri tauladan pada orang lain, karena dizaman yang modern saat ini orang jujur dan menjadi teladan orang lain sangat jarang sekali ditemukan. Wujud dari transparansi merupakan bagian dari prinsip kejujuran segala aktivitas atau kegiatan para pengurus pondok pesantren baik sikap, perilaku, dan menghindari sifat sombong, riya, iri hati, dengki, dan pendendam dalam Al-Quran sifat-sifat tersebut sangat dilarang sebagaimana dalam ayat 37 surat Al Israa', ayat 18 surat Luqman, ayat 32 surat An Nisaa' :

“Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.” (Al Israa': 37)

“Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (Luqman :18).

Ayat-ayat diatas memberi peringatan dan muhasabah diri sebagai pengontrol diri untuk melakukan yang benar. Hal inilah yang menunjukkan diri kita selalu memiliki sifat kejujuran

¹⁴ Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media. Yogyakarta.

dan makna bagi hidup untuk menjadi refleksi bagian dari amanah. Sebagaimana hasil wawancara dengan KH. Hajjad Siraj sebagai ketua pondok pesantren mengatakan bahwa:

“Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari sifat (kejujuran) untuk merefleksikan diri kita sebagai manusia yang jujur, dan patuh pada aturan serta mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pendiri pondok pesantren. Dengan demikian, kita harus berpegang pada hal yang sudah ada dan menjadi rujukan kita selalu melakukan yang terbaik untuk mengembangkan pondok pesantren lebih maju dan modern.”

Akuntabilitas keuangan merupakan laporan kejujuran dalam dimensi hubungan manusia (*hablumminannas*), hubungan dengan alam (*habluminalalaha*) dan hubungan dengan Allah (*Hablumminallah*) (Amerieska, 2009). Superioritas akuntabilitas yang berpusat pada manusia (Amerieska, 2009) dapat memberi dampak yang positif menjunjung tinggi kejujuran, amanah, dan komitmen yang ada dalam diri manusia. Dengan demikian, pembuatan laporan pertanggungjawaban yang di buat oleh pondok pesantren bukan hanya sekedar dilaporkan kepada manusia (dewan yayasan) tetapi laporan pertanggungjawaban ada niat ketataatan kepada Allah SWT dimana setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimita pertanggungjawaban kelak dikhirat, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Qiyaamah: 36, surat At-Taubah ayat 119 dan surat Al- Maidah ayat 49.

Manusia merupakan makhluk sosial, tentunya selain menjaga hubungan kepada Sang Pencipta yakni Allah SWT (*hablumminallah*), maka ada baiknya pula menjaga hubungan baik antar sesama manusia (*hablumminannas*). Pertanggungjawaban kepada manusia merupakan salah satu wujud transparansi dan sifat kejujuran kepada pihak yang berkepentingan untuk menerima informasi kebaikan bersama dan menjaga hubungan silaturrohmhi.

Sistem akuntansi yang dibuat oleh organisasi privat ataupun lembaga non pemerintah merupakan untuk membantu akuntabilitas (Lewis, 2006)¹⁵. Sistem akuntansi bertanggungjawab atas sumber daya ekonomi yang dikelolanya terlepas dari apakah transaksi dan sumber daya tersebut adalah orang-orang dari sebuah organisasi pemerintah atau badan swasta. Fungsi pelayanan ini telah menjadi aktivitas manusia yang terorganisir dari awal kali (Brown, 1905; Brown, 1962; Stone, 1969). Sistem laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara pesantren ada pada aspek transaksi penerimaan dan pengeluaran serta pelaksana/keterangan yang sangat sederhana atau tradisonal. Sebagaimana hasil wawancara dengan Irma sebagai bendahara pesantren:

“Setiap transaksi yang menyangkut dengan uang pondok pesantren sekecil apapun itu uangnya tetap (dicatat) dengan teliti dan jelas baik itu dari uang pendafran, iuran, SPP, dan sebagainya maupun dari donator. Dalam pencatatan, saya sesuai dengan prosedur yang sudah ada yaitu, ada tanggal, penerimaan, pengeluaran dan pelaksana atau keterangan, kemudian penerimaan uang yang diperoleh disetor ke bank. Sedangkan pemakaian uangpun untuk biaya operasional ada uanga kas yang disimpan untuk keperluan yang mendadak. Masalah keuangan, kami memiliki komitmen tidak ada rahasia tetapi perlu ada juga hal perlu dirahasiakan menyangkut hutang dan

¹⁵ Lewis, M.K. 2006. Accountibility and Islam. *Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transition* Adelaide.

piutang dirahasiakan namanya ketika ada keluarga dalem (kyai) tapi tetap dapat dipertanggungjawabkan dengan fakta dan penulisan yang jelas”.

Akuntabilitas keuangan merupakan mencatat setiap transaksi keuangan baik masuk atau keluar uang harus jelas sumbernya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah dan masyarakat untuk semua kegiatan sangat penting untuk iman seorang Muslim (Prasetio, 2017). Berdasarkan etika yang komprehensif dalam akuntansi (mencatat) dapat menentukan bagaimana pelaporan keuangan harus dibuat, sehingga kewajiban tersebut menimbulkan tantangan untuk pelaksanaan sistem akuntabilitas Islam (Prasetio, 2017). Hal ini, bagian dari transparansi dalam hal peratnggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan seperti santri, wali santri dan masyarakat. Sesuai hasil wawancara dengan Safira Ramadhani sebagai sekretaris pondok pesantren:

“Semua tentang hasil laporan pertanggungjawaban diusahakan (transpran) mulai dari uang dari iuran santri, SPP, pendaftaran santri baru, hasil rapat rapat tentang kebijakan akan dicatat sebaik mungkin untuk didokumentasikan dan diarsipkan untuk mewujudkan transpransi dalam lingkungan pondok pesantren dan menjaga (amanat) Kyai juga. Tidak menutup kemungkinan akan dibuka ke masyarakat tentang laporan pertanggungjawaban terkait keuangan bila ada yang ingin mengetahui.”

Sekretris pondok pesantren selalu berpegang pada prinsip transpransi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada manusia, pada aspek manusiawi (*habbluminannas*) terwujud nilai amanah, nilai profesional, nilai transparansi, nilai empati, nilai pendidikan, nilai dakwah, nilai ekonomi, dan nilai sosial dan kepada akhirat kelak (*habbluminallah*), untuk nilai keikhlasan dan nilai ikhsan (kesadaran transendental) (Puspitasari, 2011). Dengan demikian, laporan keuangan yang dibuat oleh pengelola pondok pesantren merupakan kewajiban untuk memberikan laporan kepada orang lain, untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana berbagai sumber daya telah digunakan dan apa dampaknya (Trow, 1996).

Kejujuran merupakan fundamental dari ajaran agama Islam yang memberi dorongan dan pemahaman kepada setiap umat muslim yang yakin pada Allah SWT untuk selalu taat demi tegaknya amar makruf nahi mungkar. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT kedunia untuk memperbaiki akhlakul karimah umat manusia, dengan sifat shodig, fathonah, amanah, dan tablig yang dimiliki Nabi Muhammad SAW kita dapat mengikuti jejak sifatnya, setidaknya sifat kejujuran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hasil wawancara dengan Safira Ramadhani sebagai sekretaris :

“Tentang pengelolaan keuangan pondok selalu mengedepankan (keterbukaan), dengan berlandaskan kejujuran. Kami yakin dan percaya bahwa ketidakjujuran, kecurangan, dan manipulasi akan mendatangkan kemudharotan (celaka). Ini akan mengakibatkan dampak yang luas termasuk pada diri saya dan kelangsungan masa depan pondok pesantren. Ini juga akan melanggar ajaran agama Islam yang saya pelajari selama ada dipondok berarti saya tidak mengaplikasikan atau menerapkan ajaran agama yang saya pelajari dan juga saya tidak taat atau amanah kepada kyai yang telah mempercayai saya menjadi pengurus pondok pesantren”.

Penerapan praktik akuntabilitas keuangan pesantren dilakukan dengan berlandaskan transparansi (keterbukaan) merupakan wujud dari sifat amanah dan professional (Endahwati, 2014). Pembentukan laporan yang bersifat transparan merupakan amanah Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 (Endahwati, 2014). Menegakkan prinsip-prinsip transparan adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan yang lain atau masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang terkait. Dampak dari kejujuran dan transparan adalah menimbulkan sifat tegas, bijaksana dan berani, karena kuat imannya. Orang beriman, akan selalu ingat pada dirinya menunjukkan nilai-nilai kejujuran dan transparan dalam pengelolaan pondok pesantren secara profesional.

Pondok pesantren selalu menjunjung tinggi transparansi dalam hal akuntabilitas laporan keuangan pondok pesantren. Ini semua dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi, 2008), untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat karena tujuan penciptaan manusia adalah mengemban Amanah.¹⁶, yaitu kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah SWT.

Transparansi berarti keterbukaan (Mardiasmo, 2004) sehingga pondok pesantren dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber dana yang diperoleh dengan terbuka kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan pondok pesantren, ini merupakan wujud nilai-nilai dari sifat kejujuran. Pondok pesantren berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2004).

2. Akuntabilitas Keteladanan

Keteladanan merupakan sebagai *uswatun hasanah* adalah suatu cara mendidik, membimbing dengan menggunakan contoh yang baik yang di ridloi Allah SWT sebagaimana yang tercermin dari prilaku Rasulullah dalam bermasyarakat dan bernegara.

Keteladanan dapat membantu membangun pendidikan karakter manusia dalam membentuk akhlakul karimah untuk mencapai keberhasilan hidup manusia. Ludigdo (2007)¹⁷ mengungkapkan bahwa keberhasilan hidup manusia hakikatnya tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ), tetapi lebih dari itu juga ditentukan oleh kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual akan terinternalisasi pada motivasi diri dalam menunaikan tugas dan kewajibannya. Lebih jauh Ludigdo (2007) menyatakan bahwa aspek agama sering diabaikan, padahal aspek inilah yang dapat membentuk karakter moralitas seseorang. Kadang manusia menjadi lupa pada hakikat dirinya yang meliputi tidak hanya pada unsur-unsur materi, tetapi juga spiritual (Triyuwono, 2000).¹⁸

Wawancara yang dilakukan dengan K.H. Hajjad Siraj sebagai Ketua pondok pesantren mengatakan bahwa :

“Pembuatan laporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren merupakan bentuk keteladanan kita sebagai manusia harus

¹⁶ Zakariya, Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn. 1994. *Mu'jam al-Maqayis fi Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr.

¹⁷ Zakariya, Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn. Hal. 110

¹⁸ Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. LKiS. Yogyakarta.

senantiasa memberi contoh pada yang lain terhadap apa yang kita lakukan dapat (dipertanggungjawabkan) sesama manusia dan mendapatkan ridho Allah SWT.”

Hasil wawancara KH. Hajjad Siraj diperkuat dengan wakil ketua pondok pesantren mengatakan bahwa :

“Dalam pembuatan laporan keuangan atau laporan peratanggungjawaban pesantren untuk membentuk pribadi yang mandiri dan tangguh dengan menanamkan nilai-nilai keteladanan sejak dimulai menjadi pengurus dan memberi contoh (teladan) kepada santri dalam hal perilaku dan ucapan, terkait laporan keuangan pesantren yang dibuat setiap bulan untuk melatih kedisiplinan dan kemandirian dalam hal melakukan sesuatu”.

Wawancara diatas, menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dipondok pesantren merupakan bagaian dari keteladanan kepada orang lain sebagai pengelola pondok pesantren yang mendapat amanah dan dapat dipertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*)¹⁹. Akuntabilitas keteladanan memberi dorongan proses pembelajaran kepada masyarakat untuk dipertanggungjawabkan segala aktivitas kegiatan. Namun yang terpenting adalah bagaimana pemimpin untuk menanamkan rasa iman, rasa cinta pada Allah, saling menghormati atau menghargai sesama dan lain sebagainya.

Pada dasarnya orang yang teladannya jelas untuk mendukung proses manusia ingat kepada sang khalik, yaitu kesadaran ketuhanan dan nilai ikhsan (kesadaran transendental)²⁰. Kesadaran ketuhanan dan nilai ikhsan merupakan sebagai kesadaran diri yang menyebabkan setiap manusia menyadari akan kehadiran Allah SWT setiap detik dalam jiwa manusia yang diwujudkan dalam aspek *habbluminallah*. Kehadiran Allah SWT setiap detik sebagai reaksi kesadaran diri untuk menghadapi keadaan pada saat sekarang dan pada saat diakhirat kelak.

Wawancara diatas, menunjukkan bahwa makna akuntabilitas bagian teladan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terkait keuangan pesantren dalam segala transaksi, untuk tidak melakukan perbuatan kecurangan atau penyelewengan dalam rangka menegakkan agama Islam, yaitu amar makruf nahi mungkar untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan menjaga hubungan manusia dengan manusia dalam rangka menjaga ikatan kekeluargaan dapat diwujudkan dengan nilai transparansi berupa akuntabilitas laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis, baik dalam pelaporan program kerja maupun pelaporan keuangan secara periodic²¹. Akuntabilitas ini memberi teladan dan meningkatkan kepercayaan kepada santri dan wali santri dan masyarakat.

Akuntabilitas keteladanan sebuah keniscayaan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan diwujudkan nilai transparan yang bersifat amanah dan professional (Endahwati, 2014) dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dan juga dapat dipertanggungjawabkan dunia dan akhir terkait dengan keuangan pesantren dan kegiatan

¹⁹ Simanjuntak, Dhanil A dan Januarsi, Yeni. 2011. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *SNA XIV ACEH 2011*.

²⁰ Puspitasari, Dania. 2011. Fenomenologi Praktik Akuntabilitas BMH (Baitul Maal Hidayatullah) Cabang Malang dalam Perspektif Syari'ah Enterprise Theory). Tesis. Program Magister Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

²¹ Endahwati, Yosi Dian. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah

pesantren dapat dijalankan dengan tanggungjawab untuk mencari ridho Allah SWT. Akuntabilitas keteladanan cara untuk sumber kehidupan yang dalam pengertian teknis merujuk kepada sistem hukum sesuai dengan Al Qur'an dan hadist.

Al-Qur'an dan sunah mendefinisikan dengan jelas apa yang benar, jujur dan adil, apa yang menjadi preferensi prioritas masyarakat, apa peran dan tanggung jawab perusahaan, dan juga, dalam beberapa aspek, menguraikan standar akuntansi khusus untuk praktik akuntansi²².

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan pada organisasi keagamaan yakni pondok pesantren Attanwir Putri, Dusun Kajuk, Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian bagaimana makna praktik akuntabilitas keuangan pondok pesantren. Pondok pesantren bukan hanya merupakan lembaga dakwah yang kental dengan gaya tradisionalnya dalam mewadahi ritualitas ibadah semata, melainkan pondok pesantren mampu menjaga dan membangun peradaban Islam. Pondok pesantren merupakan salah satu pondok pesantren salaf yang ada di Jawa Timur yang berusaha menjaga eksistensialitas dan fungsionalitas pondok pesantren dalam memelihara kemasyalahatan umat dan kemajuan Islam di Indonesia dan dunia terkait praktik akuntabilitas keuangan dipondok pesantren.

Al-Quran dan Al-Hadist memberi gambaran yang komprehensif tentang prinsip pertanggungjawaban yang benar (jujur). prinsip kejujuran sebagai pedoman hidup untuk melakukan aktifitas apapun dapat menghindari kecurangan dan rekayasa dalam pembuatan laporan keuangan dipondok pesantren.

Akuntabilitas kejujuran merupakan nilai kejujuran kepada Allah SWT dan sesama manusia. Dengan demikian, pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pondok pesantren bukan hanya sekedar dilaporkan kepada manusia tetapi laporan pertanggungjawaban ada niat ketaatan kepada Allah SWT dimana setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimita pertanggungjawaban kelak dikhirat, Pertanggungjawaban kepada manusia merupakan salah satu wujud transparansi dan sifat kejujuran kepada pihak yang berkepentingan untuk menerima informasi untuk kebaikan bersama dan menjaga hubungan.

Penerapan praktik akuntabilitas keuangan pondok pesantren untuk mengelola pondok pesantren dengan ketulusan, keikhlasan, kejujuran. Sehingga dalam laporan pertanggungjawaban pondok pesantren merupakan suatu kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jujur bagian dari aspek *habluminnannas*. Dengan memiliki ketaqwaan, kejujuran dan komitmen akan menjadi orang yang bijaksana dan peduli untuk kemasyalahatan bersama.

Akuntabilitas keteladanan merupakan kepercayaan dari masyarakat dengan cara transparan dengan prinsip kejujuran dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dan juga dapat dipertanggungjawabkan dunia dan akhir terkait dengan keuangan pesantren dan kegiatan pesantren dapat dijalankan dengan tanggungjawab dan untuk mencegah perbuatan kecurangan atau penyelewengan dalam rangka menegakn agama Islam, yaitu amar makruf nahi mungkar

²² Prasetio, Januar Eko. 2017. Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2017, Hlm. 19-33.

untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan menjaga hubungan manusia dengan manusia dalam rangka menjaga ikatan kekeluargaan.

Akuntabilitas keteladanan merupakan wujud dari perilaku untuk menjaga *habbluminallah* dan *habbluminannas* dengan berlandaskan pada prinsip amanah, jujur, taat dan transparan serta profesional.

Pondok pesantren selalu menjunjung tinggi transparansi dalam hal akuntabilitas keuangan pondok pesantren. Ini semua dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan kepercayaan dari masyarakat bahwa pondok pesantren merupakan tempat untuk mendidik generasi muda yang mandiri dan tangguh dengan berpegang teguh pada ajaran Al-quran dan Al-Hadist.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdar, 2014. *Praktek Akuntansi Dalam Pengelolaan Masjid*. Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Arifiyadi, Teguh. 2008. *Konsep dan Arti Akuntabilitas*. [www.google.com/Inspektorat Jenderal Depkominfo.com](http://www.google.com/Inspektorat%20Jenderal%20Depkominfo.com). Diakses 7 Maret 2016.
- Amerieska, Siti. 2009. *Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau Dari Perspektif Shari'ate Enterprise Theory*. Tesis, Program Magister Akuntansi. Pascasarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.
- Ahmed, Alim Al Ayub. 2012. Accounting in Islamic Perspective: A Timely Opportunity A Timely Challenge. *ASA University Review*, Vol. 6 No. 2, July–December, 11-31.
- Ardhiyanti, Anita. 2013. *Akuntabilitas dan Transparansi Pada Panti Asuhan*. Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Kencana. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Arian Kontemporer*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Burrell, Gibson dan Morgan, Gareth. 1979. *Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. London: Heinemen: London.
- Burrell, Gibson dan Morgan, Gareth. 1994. *Sociological Paradigms and Organizational Analysis*. Arena.
- Brown, R. (ed). 1905. *A History of Accounting and Accountants*. *Edinburgh*: TC and EC Jack.
- Brown R. G. 1962. Changing Audit Objectives And Techniques. *The Accounting Review*, October, 696-703.
- Brown, L. D. and M. H. Moore. 2001. *Accountability, a Strategy, and International Non Government Organization*. *Working Paper*. Harvard University.
- Brown, L. David and Mark H. Moore. 2001. *Accountability, Strategy, and International Non Governmental Organization*. *Working Paper*, Harvard University.
- Creswell, John W. 2012. *Researcg Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods, Third Edition*. Achmad, P. (Penerjemah). *Researgs Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Digital Al-Quranul Karim.
- Endahwati, Yosi Dian. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah*

- Prasetio, Januar Eko. 2017. Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2017, Hlm. 19-33.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) , Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance*. Mandar Maju. Bandung.
- Simanjuntak, Dahnil Anzar dan Januarsi, Yeni, 2011. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *Simposium Nasional Akuntansi Aceh*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media. Yogyakarta.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. CV Alfabeta. Bandung.
- Susilo, Joko. 2014. *Spiritualitas Santri Lelana pada Serat Mursada*. Tesis. Kajian Sastra dan Budaya Universitas Airlangga Surabaya.
- Syariati, Dian. 2012. *Praktek Akuntansi Perusahaan Manufaktur Skala Mikro*. Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Kusdiyanto. 2008. Pengelolaan Dana Yayasan Pondok Pesantren Yatim Hajjah Patisah. *WARTA*, Vol .11, No. 2, September 2008: 81 - 89 81 ISSN 1410 – 9344.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Metodologi Penelitian Komunikasi "Fenomenologi" Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*. Widya Padjajaran. Bandung.
- Kholmi, M. 2010. Persepsi Konstituen Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik (Studi di Kota Malang). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(Agustus 2010), pp.207–222.
- Lewis, M.K. 2006. Accountability and Islam. *Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transition Adelaide*.
- Ludigdo, Unti. 2007. *Paradox Etika Akuntan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2006. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance". *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2 No.1 hal.1-17.
- Mashaw, Jerry L. 2006. Accountability and Institutional Design: Some Thoughts on the Grammar of Governance, In *Public Accountability: Designs, Dilemmas And Experiences* 115 (M. W. Dowdleed)., Cambridge University Press.
- Muhammad. 2002. *Penyesuaian Teori Akuntansi Syari'ah: Persepektif Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban*. Igtisad Journal of Islamic Economics. Vol. 3, no.1. (<http://www.scribd.com/doc/76508329/Jurnal-Akuntansi-Sosial#> scribd). Diakses 7 Maret 2016.
- Mulyana, Deddy.2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Puspitasari, Dania. 2011. Fenomenologi Praktik Akuntabilitas BMH (Baitul Maal Hidayatullah) Cabang Malang dalam Perspektif Syari'ah Enterprise Theory). Tesis. Program Magister Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Prasetio, Januar Eko. 2017. Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. Volume 1, Nomor 1, Maret 2017, Hlm. 19-33.
- Randa, Fransiskus. 2011. *Rekonstruksi Konsep Akuntabilitas Organisasi Gereja: (Study Etnografi Kritis Inkulturatif Pada Gereja Katolik di Tanah Toraja)*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

- Simanjuntak, Dhanil A dan Januarsi, Yeni. 2011. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *SNA XIV ACEH 2011*.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sugiarti, Diyah Yuli. 2011. Strategi Pengembangan Pondok Pesantren Dalam Membangun Peradaban Muslim Di Indonesia. *Jurnal Edukasi*, Vol. 3, No. 1: 8 – 37.
- Sundardjanto, Djoko. 2000. Aktualisasi Filasafat Ilmu Sebagai Dasar dan Arah Pengembangan Ilmu Ekonomi: Epistemologi dan Perkembangan Teori Akuntansi. *Jurnal Perspektif* Vol. 5 No. 2.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media. Yogyakarta.
- Susilo, Joko. 2014. *Spiritualitas Santri Lelana pada Serat Mursada*. Tesis. Kajian Sastra dan Budaya Universitas Airlangga Surabaya.
- Smith, Jonathan A., Flowers, Paul., and Larkin. Michael. 2009. *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage. (<https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/interpretative-phenomenological-analysis/> book227528#preview) diakses 7 maret 2016.
- Triyuwono, Iwan. 2012. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, Jakarta: PT Grajafindo Persada.
- Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. LKiS. Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan dan Roekhudin. 2000a. Konsistensi Praktek Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada Lazis (Studi Kasus di Lazis Jakarta). *Jurnal Riset Akuntansi (JRAI)*. Vol.3. No. 2. Juli. Hal 151-162.
- Triyuwono, Iwan. 2000b. Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Metodologi Penelitian. Short Course Metodologi Penelitian paradigma Alternatif: Untuk Akuntansi dan Ekonomi Manajemen. 8-9 mei *CBIES FE UNIBRAW-IAI KAPd*.
- Triyuwono, Iwan. 2009. *Persepektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Trow, M. 1996. Trust, markets and accountability in higher education: A comparative perspective, *Higher Education Policy* 9(4), 309–324.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Fokus Media. Bandung.
- Zakariya, Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn. 1994. *Mu'jam al-Maqayis fi Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr